



BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

TRIWULAN II
TAHUN 2025

MONPERA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat menyelesaikan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2025.

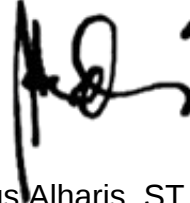
Untuk penyusunan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Capaian Kinerja Sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan.

Untuk itu kami menerima kritik dan saran demi optimalisasi peran kelembagaan dan pelaksana dalam lingkungan lembaga, demi penyempurnaan kinerja pada tahun selanjutnya.

Palermbang, Juli 2025

Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Sumatera Selatan,



M. Agus Alharis, ST, SE., M.SI
Pembina TK I / IV.b
NIP. 197208082002121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Gambaran Umum

1.2.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.2.2. Sumber Daya Manusia

1.2.3. Arah Kebijakan dan Peran Strategis

1.2.4. Sistematika Laporan

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

2.2. Perjanjian Kinerja Triwulan II 2025

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan

3.1.1. Persentase Penyerapan Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan Target dan Rencana

3.2. Capaian Akuntabilitas Kinerja Biro Administrasi Pembangunan

3.2.1. Program dan Kegiatan

3.3. Akuntabilitas Keuangan Biro Administrasi Pembangunan

3.4. Analisis Efisiensi Biro Administrasi Pembangunan

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Terwujudnya good governance merupakan harapan bagi pemerintahan untuk mencapai cita-cita setiap bangsa yang berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, oleh sebab itu diperlukan sistem akuntabilitas pertanggungjawaban yang tepat dan sesuai aturan perundang-undangan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu:

- a. Terpeliharanya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah;
- c. Terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah di daerah;
- d. Teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah;
- e. Tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum dan masyarakat;
- f. Terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah provinsi dan

menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan, penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang administrasi pembangunan.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan strategi yang bertujuan untuk menjadi pedoman dan strategis pencapaian tujuan kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2019–2023, sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, guna mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Dengan demikian, Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kegiatan tahun 2025.

1.2. Gambaran Umum.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pembentukan Organisasi Biro Administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Sumatera Selatan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan, Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah provinsi dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan, penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang administrasi pembangunan.

1.2.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.

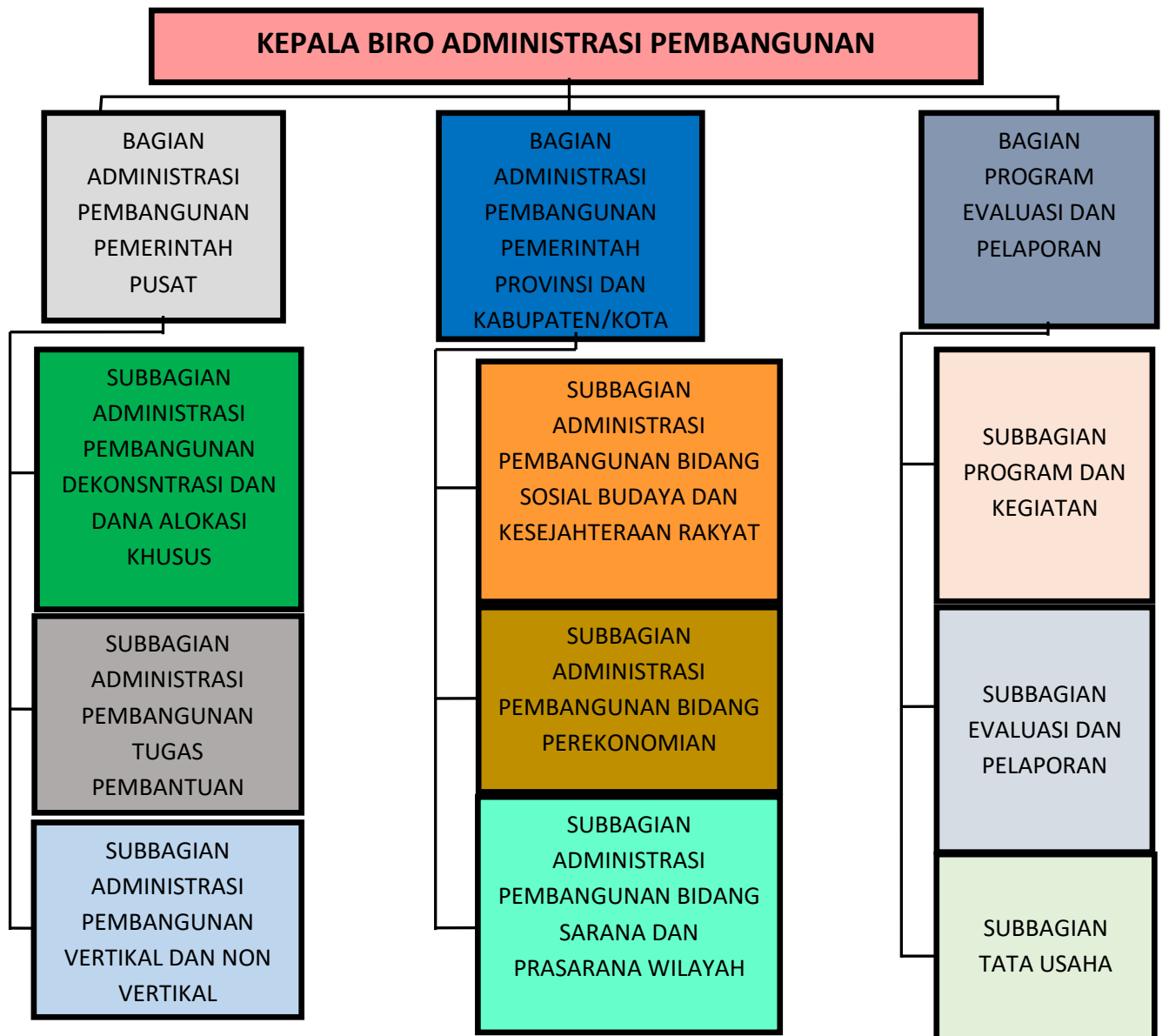
Untuk dapat menjalankan tugasnya Biro Administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Biro, dan bertanggung jawab kepada Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Biro Administrasi pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pada Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka, Biro Administrasi pembangunan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Biro
2. Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Pusat, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu;
 - a. Subbagian Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus;
 - b. Subbagian Administrasi Pembangunan Tugas Pembantuan; dan
 - c. Subbagian Administrasi Pembangunan Vertikal dan Non Vertikal.
3. Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu:
 - a. Subbagian Administrasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Subbagian Administrasi Pembangunan Bidang Perekonomian; dan
 - c. Subbagian Administrasi Pembangunan bidang Sarana dan Prasarana Wilayah.
4. Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu:
 - a. Subbagian Program dan Kegiatan;
 - b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, dan
 - c. Subbagian Tata Usaha.

Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan

Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



1.2.2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Biro Administrasi Pembangunan sebagai berikut :

Komposisi Pegawai Biro Administrasi Pembangunan

No.	JABATAN	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1.	Kepala Biro	Pembina Utama Muda : 1 Org (IV/b)	S2 : 1 Org	Laki-laki : 1 Org
2.	Kepala Bagian	Pembina TK.I (IV/b) : 2 Org	S2 : 1 Org S2 : 1 Org	Laki- laki : 1 Org Perempuan : 1 Org
3.	Kepala Sub Bagian	Pembina (IV/a) : 5 Org	S2 : 5 Org	Perempuan : 5 Org
		Penata Tk.I (III/d) : 2 Org	S1 : 1 Org D.3 : 1 Org	Perempuan : 1 Org Laki-laki : 1 Org
4.	Staf	Penata Tk.I (III/d) : 3 Org	S1 : 3 Org	Laki-laki : 2 Org Perempuan : 1 Org
		Pengatur Tk. I (II/d) : 1 Org	SLTA : 1 Org	Laki-laki : 1 Org
5.	PPPK	-	S1 : 4 Org SLTA : 1 Org	Laki-laki : 2 Org Perempuan : 2 Org Perempuan : 1 Org
	Jumlah Pegawai	:19 Org		Laki-laki : 8 Org Perempuan :11 Org
			S2 : 8 Org	
			S1 : 8 Org	
			D.III : 1 Org	
			SLTA : 2 Org	

1.2.3. Arah Kebijakan dan Peran Strategis

Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2025

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Meningkat	• Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	• Meningkatkan Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Fisik Kegiatan • Meningkatkan Fasilitas Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD

1.2.4. Sistematika Laporan

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, arah kebijakan dan peran strategis.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan gambaran singkat Biro Administrasi Pembangunan, visi dan misi, tujuan, perjanjian kinerja tahun 2025.

Bab III : Akuntabilitas

Pada bab ini disajikan capaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan pemerintah provinsi sumatera selatan, capaian akuntabilitas kinerja sekretariat daerah, akuntabilitas keuangan dan analisis efisiensi.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan Kinerja Instansi Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, Permasalahan yang dihadapi, Pemecahan Masalah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

VISI DAN MISI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

2.1. VISI DAN MISI

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 merupakan penjabaran visi, misi dan program

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Keselarasan Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 terkait dalam Misi ke-3 yaitu:

MISI 3

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.”

TUJUAN

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan”

SASARAN

“Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah (Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas).”

1. Visi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan diselaraskan dengan Visi Gubernur Sumatera dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2019-2023, maka Visi Biro Administrasi Pembangunan adalah “ Terwujudnya Pelayanan Administratif dalam Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Bidang Pembangunan yang diselaraskan dengan Program Sumsel Maju untuk semua Tahun Anggaran 2019-2023”.

2. Misi

Terwujudnya Visi yang dikemukakan diatas merupakan hal yang harus dihadapi dan dilaksanakan oleh segenap Aparat Birokrasi dalam Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumsel.

Sejalan dengan Visi, maka Misi Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumsel adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, serta meningkatkan sinergi pembangunan antar daerah kabupaten/kota, pembangunan antar sektor lainnya;
2. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, pembangunan kabupaten/kota dan pembangunan antar sektor lainnya secara administratif;
3. Mengevaluasi bahan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, pembangunan antar kabupaten/kota dan antar sektor lainnya;
4. Meningkatkan koordinasi mengenai bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, pembangunan antar kabupaten/kota dan pembangunan antar sektor lainnya
5. Meningkatkan hasil pelaporan mengenai pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan, pembangunan antar kabupaten/kota dan pembangunan antar sektor.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rantang waktu satu tahun tertentu untuk mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan juga pemberian sanksi.

Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumsel telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada, penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025, Penetapan Kinerja tahun 2025 dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan sesuai Rencana dan Target.	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan

Indikator kinerja Utama yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Secara Fisik

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan sesuai rencana dan target.	%	90	23,17	27,69

2. Capaian Kinerja Secara Keuangan

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
1.	Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan sesuai rencana dan target.	%	90	23,17	27,69

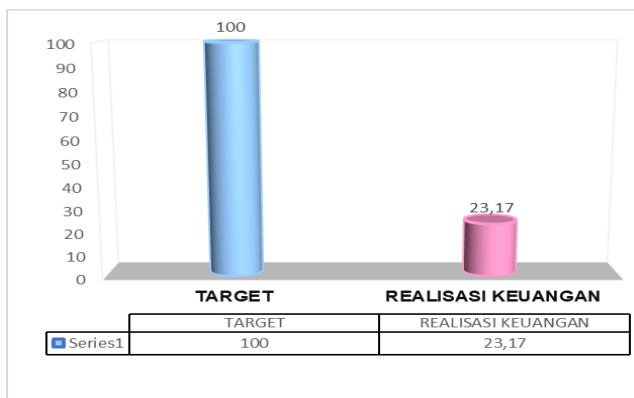
Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya pelayanan pembinaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

3. Capaian Kinerja

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian %
1.	Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan sesuai rencana dan target.	%	90	23,17	25.74

3.1.1. Persentase Penyerapan Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan Target dan Rencana.

Persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan pada Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan target dan rencana pada tahun 2025 ditargetkan 90%, terealisasi keuangan 23,17%, dan fisik 27,69% atau realisasi sebesar 90% Triwulan II pada Biro Administrasi Pembangunan.



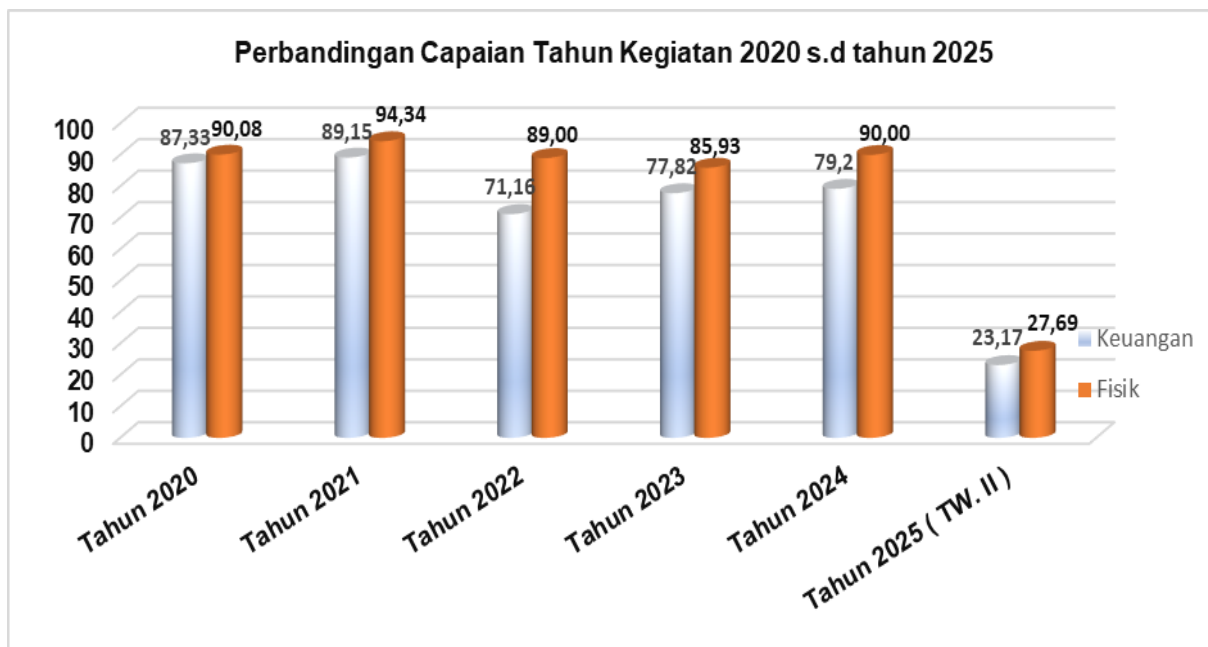
Grafik Persentase Penyerapan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Target dan Rencana Triwulan I Tahun 2025

3.2. Capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan Sesuai Rencana dan Target.	%	90,00	23,17	23,17	100,00	23,17

Tahun Kegiatan		Perbandingan Capaian Tahun Kegiatan 2020 s.d tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
1	Kegiatan Tahun 2020	%	100	87,33	90,08
2	Kegiatan Tahun 2021	%	100	89,15	94,34
3	Kegiatan Tahun 2022	%	100	71,16	89,00
4	Kegiatan Tahun 2023	%	100	77,82	85,93
5	Kegiatan Tahun 2024	%	100	79,20	90,00
6	Kegiatan Tahun 2025 (TW.II)	%	100	23,17	27.69



Dari diagram diatas persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan target dan rencana dari tahun 2020 s.d 2022 mengalami Penurunan Penyerapannya, pada tahun 2023 dan tahun 2025 mengalami peningkatan dikarenakan ada program-program yang dapat terlaksana dengan maksimal.

Capaian indikator Persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun kemarin, Peningkatan tersebut dikarenakan semakin meningkatnya aktivitas monitoring dan evaluasi terkait Program / Kegiatan baik reguler maupun Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

Adapun program yang menunjang keberhasilan indikator ini yaitu program kebijakan administrasi pembangunan dengan kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah.

3.2.1. Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2025 Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumsel sebesar Rp. 2.372.097.225,- (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang mencakup 2 (Dua) Program, 6 (Enam) Kegiatan dan 15 (Lima Belas) Sub Kegiatan.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan:

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

3. Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah;

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

Sub Kegiatan:

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

II. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah

- Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
- Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah.

Tahun 2025, untuk program/kegiatan Biro Administrasi Pembangunan persentase penyerapan Realisasi Keuangan sebesar 23,17% dan Realisasi Fisik sebesar 27,69%.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tercantum dalam Anggaran Tahun 2025 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran pada Triwulan II adalah sebesar Rp. 1.350.244.389,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan Realisasi Keuangan pada Triwulan II sebesar Rp. 312.813.117,- (Tiga ratus dua belas juta delapan ratus tiga belas ribu seratus tujuh belas rupiah) dengan Realisasi Keuangan (23.17%) dan untuk Realisasi Fisik mencapai (27,69%), bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 Akuntabilitas Keuangan

No	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	4	5	6
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan	1.350.244.389,-	312.813.117,-	23.17

TRIWULAN II (BULAN JUNI 2025)

3.4. Analisis Efisiensi

Efisiensi pada pelaporan ini berdasarkan capaian kinerja dan besaran sisa anggaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila target sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai atau melebihi target yang direncanakan. Dari lima belas sasaran, terdapat enam sasaran yang capaian kerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA % CAPAIAN KEUANGAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	4	5	6
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan	100,00	23,17	76,83

Efisiensi anggaran di Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, didorong oleh kebijakan untuk mengalokasikan anggaran dengan kebijakan belanja berbasis program serta pemberian apresiasi terhadap upaya efisiensi pada penilaian kinerja kegiatan instansi.

BAB IV

PENUTUP

IV. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Triwulan II Biro Administrasi Pembangunan mempunyai harapan kedepan dalam rangka memperbaiki Penyusunan Laporan ini agar dapat mempertahankan dan meningkatkan Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang sesuai.

Adapun beberapa langkah akan dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan hasil pelaporan OPD dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, serta meningkatkan sinergi pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan pembangunan antar sektor;
3. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, pembangunan kabupaten/kota dan pembangunan antar sektor lainnya secara administratif.

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Semoga Laporan ini dapat digunakan sebagai acuan Penyusunan Perencanaan Laporan kinerja pada tahun yang akan datang.

Palermbang, Juli 2025

Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Sumatera Selatan,

M. Agus Alharis, ST.,SE.,M.SI
Pembina TK I / IV.b
NIP. 197208082002121002

LAMPIRAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
LKJIP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024
PENGUKURAN KNERJA (P.K)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian (%)	SKPD Penanggungjawab
1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	1.1 Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah	1.5.1 Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan Sesuai Rencana dan Target	%	90,00	23,17	25,74	Biro Administrasi Pembangunan
		RATA - RATA					25,74	

TRIWULAN II (BULAN JUNI 2025)

**LAPORAN PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025
TRIWULAN II**

Perangkat Daerah : Biro Administrasi Pembangunan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Tahun 2025			Sumber Pendanaan (APBD/DAK Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							Realisasi Keuangan (Rp)	(%)	Realisasi Fisik dan Fisik (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					749.494.389	154.185.822	20,57					
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat		%	100	20.000.000	0,00	0,00	0,00				
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	1 Dokumen	%	100	0,00	0,00	0,00	0,00	APBD	Palembang		
1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	%	100	20.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Palembang		
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	100	111.160.000	32.080.000						
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan tugas ASN (KPA dan PPTK)	1 Orang KPA dan 5 Orang PPTK	%	100	111.160.000	32.080.000	28,86	28,86	APBD	Palembang		
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur yang Terlaksana		%	100	81.000.000	0,00	0,00	0,00				
3.1	Pengadaan Pakaiain Dinas Bersama Attribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiain Dinas Bersama Attribut Kelengkapannya	1 Paket	%	100	25.000.000	0,00	0,00	75,00	APBD	Palembang		
3.2	Pendidikan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	%	100	26.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Palembang		
3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	5 Orang	%	100	30.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD	Palembang		
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perantoran yang Terlayani		%	100	279.051.257	15.120.822	-	-				
4.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Untuk Kelancaran kegiatan Administrasi Perantoran	1 Paket	%	100	31.551.257	-	-	25,00	APBD	Palembang		
4.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Laporan	%	100	247.500.000	15.120.822	6,11	17,00	APBD	Palembang		

5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		%	100	-	-	-	-				
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	3 Unit	%	100	-	-	-	-	APBD	Palembang		
5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran yang tersedia	10 Unit	%	100	-	-	-	-	APBD	Palembang		
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhi nya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia		%	100	258.283.132	106.985.000		-				
6.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	1 Laporan	%	100	258.283.132	106.985.000	41,42	41,42	APBD	Palembang		
II	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase OPD yang Melaksanakan Program Sesuai Rencana dan Target dalam Kategori Kinerja Tinggi dan Sangat Tinggi				600.750.000	158.627.295	26,40					
1	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		%	100	326.250.000	98.432.730						
1.1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Dana APBD Provinsi	1 Laporan	%	100	120.750.000	47.796.451	39,58	50,00	APBD	Palembang		
1.2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Dana APBN Provinsi	1 Laporan	%	100	91.500.000	29.294.225	32,02	40,00	APBD	Palembang		
1.3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Dana Wilayah Kab./Kota	1 Laporan	%	100	114.000.000	21.342.054	18,72	35,00	APBD	Palembang		
2	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		%	100	274.500.000	60.194.565		-				
2.1	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	1 Dokumen	%	100	91.500.000	19.917.450	21,77	35,00	APBD	Palembang		
2.2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	%	100	91.500.000	18.187.115	19,88	33,00	APBD	Palembang		
2.3	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	%	100	91.500.000	22.090.000	24,14	35,00	APBD	Palembang		
	JUMLAH					1.350.244.389	312.813.117	23,17	27,69				



**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TERIMA KASIH**

 adpemb2023@gmail.com

